

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN MUNA**



Diajukan Oleh :

NENY SURTIA

45 08 011 011

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI
PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR
EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN MUNA

NAMA MAHASISWA : NENY SURTIA

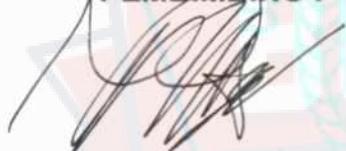
NOMOR STAMBUK : 45 10 011 011

FAKULTAS : EKONOMI

PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

TELAH DISETUJUI :

PEMBIMBING I



(IRWAN L. GAFFAR, SE., M.Si.)

PEMBIMBING II



(CHAHYONO, SE., M.Si.)

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

KETUA PROGRAM STUDI ILMU
EKONOMI & STUDI PEMB.



(MUHLIS RUSLAN, SE., M.Si.)



(RAFIUDDIN, SE.)

Tanggal Pengesahan : 2012

HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juni 2012

Skripsi Atas Nama : Neny Surtia

No. Stambuk : 45 10 011 011

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH.
(Rektor Univ. "45" Makassar)



Ketua : Muhlis Ruslan, SE., M.Si (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Chahyono, SE., M.Si. (.....)

Anggota Penguji : 1. Irwan L. Gaffar, SE., M.Si. (.....)

2. Chahyono, SE., M.Si. (.....)

3. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si. (.....)

4. Haeruddin Saleh, SE., M.Si. (.....)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang tepat penulis ucapkan kecuali hanya pada kata bersukur segala puji bagi Allah Subhana Wata'Ala, oleh karena berkat hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi seorang mahasiswa. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi, dalam skripsi ini penulis membahas mengenai "Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muna".

Pada dasarnya setiap daya upaya yang dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran pasti akan membawa hasil yang maksimal. Namun demikian juga penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan penulis, karena dalam pembahasan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Kedua Orang Tuaku, Suami, dan anak-anak ku tercinta, serta seluruh keluarga yang dengan berkat do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH sebagai Rektor Universitas “45” Makassar yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
2. Bapak Muhlis Ruslan, SE, M.Si sebagai Dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar
3. Irwan L. Gaffar, SE, M.Si dan Bapak Chahyono, SE, M.Si masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran yang sangat membantu sehing penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rafiuddin, SE selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar.
5. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara khususnya pada pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Muna.

Makassar,Mei 2012

Penulis

Neny Surtia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Kerangka Teori.....	4
2.1.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	4
2.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	11
2.1.3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.4. Pengertian Nilai Tambah Ekonomi.....	16
2.1.5. Pengertian Pendapatan.....	18
2.1.6. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20
2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja.....	22
2.2. Kerangka Pikir.....	25
2.3. Hipotesis.....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	27
3.3. Jenis dan Sumber data.....	28
3.3.1. Jenis data.....	28
3.3.2. Sumber Data.....	28
3.4. Metode Analisis.....	29
3.5. Defenisi Operasional.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Muna.....	31
4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Muna.....	33
4.3. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Muna.....	36
4.4. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Pertambangan di Kabupaten Muna.....	39
4.5. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Kabupaten Muna.....	41
4.6. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Jasa Kabupaten Muna.....	45
4.7. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna Berdasarkan Harga Konstan.....	48
4.8. Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Muna.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1. LUAS WILAYAH KABUPATEN MUNA DIRINCI BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2012.....	32
TABEL 4.2. PERKEMBANGAN ANGKA JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 – 2010.....	34
TABEL 4.3. NILAI PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN BERDASARKAN HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 – 2010 (JUTAAN RUPIAH).....	37
TABEL 4.4. NILAI PRODUKSI SEKTOR PERTAMBANGAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 - 2010 (JUTAAN RUPIAH).....	40
TABEL 4.5. NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 – 2010 (JUTAAN RUPIAH).....	43
Tabel 4.6. NILAI PRODUKSI SEKTOR JASA ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 - 2010 (JUTAAN RUPIAH).....	47
TABEL 4.7. NILAI PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 – 2010 (JUTAAN RUPIAH).....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara apakah itu negara maju atau negara sedang berkembang, selalu berusaha mendorong laju pertumbuhan ekonominya. Karena dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara Indonesia, sebagai salah satu negara sedang berkembang, selalu berusaha mendorong laju pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimilikinya, sedangkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh perkembangan produksi sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri dan sektor jasa. Diakatakan suatu negara terjadi pergeseran sektor ekonomi apabila pada setiap sektor ekonomi memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional. Sebagai suatu contoh di mana sektor pertanian nilai produksinya memberikan kontribusi terhadap *gross national product* (GDP) dan demikian pula pada aspek penyerapan tenaga kerja. Kemudian disisi lain sektor industri juga demikian, memberikan kontribusi yang besar terhadap *gross national product* (GDP) dan seterusnya pada sektor jasa, yang dalam artian bahwa dikatakan terjadi pergeseran sektor ekonomi apabila sektor pertanian mampu mendorong pergeseran sektor industri dan sektor industri mampu mendorong pergeseran sektor jasa baik dalam bentuk nilai tambah produksi maupun pada tingkat penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Muna dalam mendorong pertumbuhan ekonominya berupaya agar sektor-sektor ekonomi yang dimiliki terus mengalami peningkatan produksi maupun peningkatan nilai produksi. Hal ini sangat beralasan karena di dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten atau Kota maka yang dilihat adalah seberapa besar nilai produk domestik regional bruto (PDRB) yang dimiliki daerah tersebut serta perkembangannya mengalami terus peningkatan dari tahun ke tahun

Perkembangan nilai produksi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muna berdasarkan data yang penulis peroleh pada tahun 2006 nilai produksi ketiga sektor ekonomi jumlahnya yaitu sebesar Rp. 135.225,23 juta sedangkan pada tahun 2010 nilainya sebesar Rp. 389.449,75 juta. dengan rata-rata kenaikannya selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 236.807,46 juta sedangkan rata-rata perkembangannya setiap tahun selama lima tahun yaitu sebesar 30,43%.

Berdasarkan penjelasan data tersebut di atas, maka mendorong bagi penulis untuk meneliti dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muna”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat yaitu : Sektor ekonomi apakah yang paling terbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten muna dari tahun 2006 hingga tahun 2010

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka yang menjadi manfaat penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui sektor ekonomi apa yang paling terbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muna dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui pula perkembangan sektor-sektor ekonomi dan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna dari tahun 2006 hingga tahun 2010

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Sebagai bahan masukan bagi dinas terkait dalam mengambil keputusan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna.
2. Sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang menganalisis kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang kondusif pada suatu negara atau daerah, maka setiap daerah biasanya harus menyusun suatu perencanaan yang baik dan berkesinambungan. Perencanaan itu bisa dalam bentuk perencanaan tata ruang atau wilayah, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, perencanaan dalam penganggaran dan perencanaan perencanaan lainnya.

Banyak para ahli ekonomi dalam memberikan pengertian dan konsep perencanaan sangatlah berbeda beda akan tetapi dalam praktek dan aplikasi perencanaan serta tujuan dari perencanaan itu sendiri pada hakekatnya adalah sama. Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka pengertian perencanaan sebagaimana yang di jelaskan oleh Bintaro Tjokroamidjojo (2000 : 12) mengatakan sebagai berikut:

“Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan di lakuka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia”

Pengertian lain menurut Bintaro Tjokroamidjojo (2000 : 12) mengatakan sebagai berikut Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya (*maximum output*) dengan sumber sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Kalau di analisis pengertian perencanaan tersebut di atas, maka dapat di katakan bahwa di dalam melaksanakan suatu aktifitas tertentu maka seseorang harus mengetahui terlebih dahulu sasaran dan tujuan yang akan di capai dari aktivitas kegiatan yang di lakukan. Oleh karena untuk mencapai sasaran dan tujuan itu maka harus di susun suatu perencanaan yang tepat serta dapat bersinambungan dari setiap aktifitas tersebut.

Pengertian lain perencanaan pembangunan dalam buku yang sama yang di kemukakan oleh Bintaro Tjokroamidjojo (2000 : 12) mengatakan sebagai berikut:

“Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan di capai atau yang akan di lakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Oleh karena albert waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.”

Selanjutnya dalm buku yang sama pula pengertian perencanaan menurut Bintaro Tjokroamidjojo (2000 : 12) mengatakan sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik serta lebih efisien dan efektif.”

Kata kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan hubungan erat dengan perumusan kebijaksanaan (*policy formulation*). Oleh karena itu dalam buku *planning for economic development* prof. Timbergen mengatakan bahwa dalam memberikan pengertian kebijaksanaan pembangunan (*development policy*) lebih luas dari perencanaan (*palns*). Usaha berencana yang di lakukan melalui pran pemerintah pada umumnya termasuk kategori yang pertama sedangkan yang kedua berarti suatu program investasi terdiri dari proyek proyek. Kemudian prof. Wijoyo mengemukakan bahwa salah satu kegiatan penting dalam suatu usaha

pembangunan berencana adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dari berbagai definisi definisi tersebut memang dapat di ketahui tentang perencanaan itu sendiri.

Secara sederhana, usaha pembangunan yang di lakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi membutuhkan sebuah perencanaan yang akurat. Perencanaan ini dapat di lakukan oleh berbagai institusi yang berwenang atas tercapainya kesejahteraan yang merata di antara penduduk suatu daerah/kota. Namun pada umumnya, perencanaan di lakukan oleh lembaga pemerintah mengingat seorang individu akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan dampak yang di timbulkan kepada individu lain. Untuk meredam benturan kepentingan antar individu inilah lembaga pemerintahan yang di tunjuk menjadi lembaga yang melakukan perencanaan pembangunan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang di maksud dengan perencanaan, sehingga untuk melakukannya di pilih institusi pemerintah yang bersifat netral dalam menyelesaikan konflik kepentingan antar individu.

Pada hakekatnya perencanaan merupakan sebuah usaha untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal yang dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Pengertian yang di miliki sebuah proses perencanaan tidak terbatas pada definisi di atas, karena perencanaan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan

menuju tujuan yang ingin di capai di samping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang di lakukan.

Perencanaan mampu mengatasi ketidak seimbangan yang bersifat akumulatif. Ketidak seimbangan semacam ini dapat di contohkan oleh konsep lingkaran setan yang acapkali di derita oleh sebagian besar penduduk di dunia. Wujud nyata dari lingkaran setan ini adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagai akibat ketidak mampuan generasi sebelumnya untuk lepas dari kemiskinan. Dengan kata lain, seorang individu A tidak dapat bekerja di sebuah perusahaan dengan tingkat upah yang tinggi akibat rendahnya pendidikan yang di milikinya. Namun setelah di uraikan lebih mendalam rendahnya pendidikan yang di terima oleh individu A ini ternyata di sebabkan oleh ketidak mampuan orang tuanya untuk membiayai pendidikan si A sehingga si A harus bekerja pada usia yang relatif muda. Hubungan sebab akibat antara siatu kondisi dengan kondisi yang lain inilah yang kemudian di sebut sebagai lingkaran setan (*vicious circle*)

Menurut Lincoln Arsyad (1999;103) mengatakan :

“Upaya untuk mengantisipasi lingkaran setan yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, melakukan pembangunan dengan mencari modal dari luar negeri dan kedua, menghimpun tabungan wajib dari dalam negeri. Namun bagaimana usaha untuk merealisasikan dua jenis upaya tersebut merupakan tugas yang diemban oleh sebuah perencanaan pembangunan.”

Dari uraian diatas, maka menurut Tri Widodo (2006 ; 3) mengatakan sebagai berikut :

“Perencanaan kemudian dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Artinya, dalam sebuah proses perencanaan wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada di wilayah tersebut.”

Defenisi yang terpisah-pisah mengenai perencanaan memang sangat banyak, tetapi suatu teori umum mengenai perencanaan belum dijumpai dalam buku-buku atau dalam bentuk tertulis. mengingat pokok isinya yang sedemikian evolusiner dan peka terhadap sejarah perkembangannya sendiri dan juga terhadap perkembangan-perkembangan lebih luas yang sedang terjadi dalam masyarakat sebagai keseluruhan.

Ciri-ciri pokok dalam perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan beruntun yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang. Persoalan-persoalan perencanaan memang beraneka ragam, namun terlihat kegenderungan bahwa yang terutama adalah persoalan-persoalan ekonomi dan sosial, periode perencanaan, cakrawala waktu dari “masa datang,” juga bermacam-macam sesuai dengan tipe dan tingkat perencanaan, namun demikian semua perencanaan mencakup suatu proses yang beruntun yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahap, seperti:

- Identifikasi persoalan
- Perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus dan yang dapat diukur, bertalian dengan persoalan yang bersangkutan.
- Identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin
- Proyeksi mengenai keadaan di masa datang

- Pencarian dan penilaian berbagai arah kegiatan alternatif
- Serta menyusun suatu rencana yang dipilih, didalamnya dapat tercantum sesuatu perumusan kebijaksanaan atau strategi dan juga suatu rencana yang definitif.

Berdasarkan pada ciri-ciri dari pokok perencanaan tersebut, maka pengertian perencanaan menurut Paul Sitohang (2001 ; 3) mengatakan sebagai berikut:

“Perencanaan adalah terutama suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, perencanaan adalah terutama berorientasi kepada masa datang, sangat berkesan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijaksanaan dan program yang menyeluruh. Bilamana cara berpikir ini diterapkan, maka dapat di katakan bahwa perencanaan sedang di laksanakan”.

Di dalam kerangka perencanaan umum ini terdapat tipe-tipe perencanaan yang sangat beraneka ragam. Perbedaan-perbedaan pokok tertentu antara berbagai macam tipe ini adalah sangat bermanfaat bagi analisa kita mengenai perencanaan regional. Perbedaan pertama dan barangkali juga yang paling hakiki dan selalu merupakan sumber kekaburan dalam perencanaan regional adalah antara perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik (*physical planning*) adalah perencanaan struktur fisik sesuatu daerah (area) tata guna tanah, komunikasi, utilitas dan sebagainya dan berasal dari penataan dan pengendalian pengembangan kota. Dalam hal ini kemampuan perencanaan fisik adalah lebih unggul dari pada mekanisme pasar. Perencanaan ekonomi (*economic planning*) lebih berkenaan dengan struktur ekonomi sesuatu daerah dan tingkat kemakmurannya secara keseluruhan. Perencanaan ekonomi lebih bertumpu pada mekanisme pasar daripada perencanaan fisik yang sangat bertumpu pada

pengendalian yang bersifat antara perencanaan fisik dan ekonomi ini sebagai hal yang bersifat mutlak, suatu salah pengertian yang disebabkan karena perencanaan fisik adalah suatu saran yang penting dalam pelaksanaan rencana dan demikian juga kebalikannya.

Perbedaan kedua adalah perencanaan alokatip dan inivatif. Istilah-istilah ini adalah nama yang diberikan kepada dua model instrumental dari perencanaan yang dibagi menurut fungsi atau daerah kepentingan dari perencanaan yang dibagi menurut fungsi atau daerah kepentingan (*area of concern*).

Perenganaan alokatip (*alocative planning*) adalah berkenaan dengan koordinasi penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar dapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh. Itulah sebabnya perencanaan ini kadang-kadang dinamakan perencanaan yang bersifat mengatur (*regulatory planning*). Pada tingkat perusahaan kecil hal ini berarti perencanaan mengenai penyerahan input bahan-bahan baku dan tenaga kerja dan distribusi barang-barang akhir. Pada tingkat perekonomian nasional, hal ini berarti pengaturan perekonomian secara bulanan dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Pada pihak lain, perencanaan inovatif (*inovalitive planning*) tidaklah semata-mata berkenaan dengan perencanaan yang bertujuan agar sistem yang bersangkutan dapat berfungsi secara efisien tetap lebih berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem yang bersangkutan sebagai keseluruhan, dengan menunjukkan sarana-sarana baru dan berusaha menimbulkan perubahan-

perubahan besar. Itulah sebanya perencanaan ini kadang-kadang dinamakan (*development planning*).

Berkenaan dengan contoh perusahaan kecil tersebut diatas, pemasaran suatu produk baru atau pembukaan atau suatu pabrik tambahan dalam suatu jangka waktu tertentu, adalah termasuk perencanaan inovatif.

2.1.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Perbedaan cara pandang mengenai proses pembangunan yang dilakukan akan menyulitkan kepada kita tentang seberapa maju proses-proses pembangunan yang dilakukan di sebut negara atau daerah. Untuk mengatasi kerancuan definisi tersebut, maka pada pembahasan ini, akan menjelaskan mengenai definisi pembangunan yang umum di gunakan. Untuk menjelaskan definisi tersebut, pengetahuan pembangunan dapat di jelaskan dengan menggunakan dua pandangan yang berbeda.

Menurut Tri Widodo (2006 : 3) mengatakan pembangunan ekonomi yang di pandang dari pendekatan pembangunan tradisional yaitu:

“Pembangunan ekonomi yaitu sebagai berbagai upaya yang di lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tingkat nasional atau produk domestic regional bruto (PDRB) di tingkat daerah.”

Pembangunan indikator PDB ini terkait dengan kemampuan indikator ini dalam mencerminkan tingkat kemakmuran bangsa. Dengan kata lain, indikator ini memungkinkan kita mengetahui tingkat output yang di produksi negara untuk di konsumsi oleh penduduknya atau di gunakan untuk melakukan investasi selain penggunaan indikator PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan di suatu negara,

beberapa ahli ekonomi pembangunan lain menggunakan indikator produksi dan penyerapan tenaga kerja di negara tersebut.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Kiranya sukar untuk menghubungkan atau kekayaan dengan kebahagiaan. Kesejahteraan tergantung pada bagaimana pandangan seseorang terhadap kehidupan manusia. Orang yang kaya belum tentu lebih sejahtera di bandingkan dengan orang miskin. Seseorang belum tentu merasa lebih sejahtera kalau penghasilannya bertambah. Kekayaan akan menambah kebahagiaan kalau kekayaan itu menambah alat alat pemenuh kebutuhan dan bukannya menambah jumlah kebutuhan.

Dalam teori teori pembangunan ekonomi banyak para ahli ekonomi seperti adam smith, david ricardo, thomas robert malthus dan para ekonomi lainnya pada zaman abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 telah menghasilkan suatu konsep teori pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi pada abad tersebut di atas dikenal dengan aliran klasik dan di mana konsep dasar pembangunan ekonominya mengatakan (Irawan, M. Suparmoko, 1992;15) yaitu sebagai berikut:

“Kemajuan teknologi mula mula di sebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital. Dengan adanya akumulasi kapital akan memungkinkan di laksanakannya bertambah. Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada keuntungan akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (law of diminishing returns)”

Berdasarkan pada penjabaran dasar teori pembangunan yang di kemukakan oleh para aliran klasik tersebut di atas, maka pengertian pembangunan ekonomi

meurut irawan dan M. Suparmoko (1992 ; 5) menjelaskan sebagai berikut: Pembangunan ekonomi adalah usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali di ukur dengan tingi rendahnya pendapatan rill per kapita”

Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping meningkakan pendapatan nasional rill untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat di katakan bahwa tingkat output pada satu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau di gunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta sikap dari output itu sendiri.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka pengertian pembangunan ekonomi menurut Lingcolin Arsyad (1999; 70) mengatakan sebagai berikut :

“Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang di sebabkan oleh inovasi yang di lakukan oleh para wiraswasta. Inovasi di sini berarti peraikan teknologi dalam arti luar, misalnya enemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreatifitas wiraswasta”.

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi.

2.1.3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Semenjak berakhirnya perang dunia kedua, perkembangan teori pembangunan ekonomi menjadi sangat cepat. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa model teori. Perkembangan teori ini didominasi oleh empat aliran pembangunan ekonomi, yaitu (1) teori tahap linier, (2) model perubahan

struktural, (3) revolusi ketergantungan internasional dan (4) kontrarevolusi pasar bebas neo klasik.

Di dalam teori tahapan linear, terdapat dua teori dasar, di mana menurut Tri Widodo (2006 ; 5) mengatakan sebagai berikut :

“Teori pertama adalah teori tahapan pertumbuhan, di mana dalam setiap pembangunan yang dilakukan, sebuah negara haruslah melewati beberapa tahapan tertentu. Tahapan yang harus dilewati oleh setiap negara adalah sama. Menurut teori ini, negara-negara maju telah mencapai tahapan tinggal landas. Untuk mencapai tahapan ini, sebuah negara harus mampu menggerakkan dana tabungan yang dimiliki oleh negara tersebut guna menciptakan dasar investasi yang memadai untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi”.

Sedikit banyak terdapat kaitan dengan usaha untuk mencapai tahapan tinggal landas, teori kedua merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memobilisasi dana tabungan disebuah negara. Oleh karena itu, dalam buku yang sama menurut Tri Widodo (2006 ; 5), mengatakan bahwa :

“Dalam proses pertumbuhan ekonomi setiap perekonomian harus memiliki tabungan yang dapat diinvestasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan PDB-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Perlu pula diingat, bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cepat juga tergantung pada tingkat produktivitas investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi”.

Kalau dianalisa dari kedua pengertian tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada suatu negara maka faktor penentunya terdapat pada aspek adanya dana tabungan yang dimiliki suatu negara, serta adanya kemajuan investasi pada sektor produktif pada negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Hal ini sangat penting karena dalam perekonomian apapun bentuknya peranan modal apakah itu

bersumber dari pinjaman luar negeri ataupun tabungan dalam negeri memegang andil besar di dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter (Lingcolin Arsyad 1999 ; 70), mengatakan sebagai berikut :

“Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi”. Produksi itu sendiri misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi”.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi di suatu negara. Kemiskinan yang berlangsung terus, dibanyak negara-negara dunia ke tiga merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (stagnasi).

Oleh karena itu untuk mengetahui ada tidaknya suatu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, menurut Tulus T. H. Tambunan (2001 ; 57) mengatakan sebagai berikut :

“Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek permintaan *aggregate (aggregate demand)* dan dari sisi penawaran *aggregate (aggregate supply)* dan dari kedua aspek ini akan menciptakan output aggregate yang dihasilkan dari dalam suatu perekonomian yang biasanya disebut produk domestik bruto (PDB) yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan nasional”.

Lain halnya pandangan Subandi (2005 ; 25) tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

“Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dinilai dengan berbagai agregate. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat di ukur melalui sebuah besaran dengan istilah pendapatan nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi output suatu bangsa, dan ini sangat representatif dan sangat lazim digunakan”.

Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan negara lain. Di samping itu, dari pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh turunnya (*dirtyed measures*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Sedangkan pendapatan perkapita itu sendiri merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah suatu negara atau daerah mengalami tingkat kesejahteraan yang diperoleh dari beberapa besar produk nasional bruto (PNB) atau *gross national product* (GNP) kalau dilihat dari aspek nasional/negara akan tetapi kalau dilihat dari aspek wilayah regional maka yang dinilai yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

2.1.4. Pengertian Nilai Tambah Ekonomi

Perhitungan produk nasional bruto (PNB) yang didasarkan pada pendekatan produksi memerlukan data tentang nilai tambah setiap produksi yang dihasilkan dalam suatu negara atau daerah. PNB diperoleh dengan mengalikan setiap produksi yang dihasilkan dengan nilai tambahnya.

Berdasarkan penjelasan dasar tentang perhitungan nilai tambah dengan menggunakan pendekatan produksi, maka pengertian nilai tambah menurut Dumairy (1997 ; 39) mengatakan sebagai berikut :

“Nilai tambah (Value Added) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Nilai tambah sektoral suatu produk mencerminkan nilai tambah produk tersebut disektor bersangkutan. Nilai tambah yang dihitung menurut harga tahun yang berjalan disebut nilai tambah harga

berlaku serta nilai tambah juga dapat dihitung berdasarkan harga konstan tahun tertentu”.

Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara yaitu :

1. Metode deflasi ganda
2. Metode ekstrapolasi langsung
3. Metode deflasi langsung
4. Metode deflasi komponen pendapatan.

Tiga yang pertama diterapkan dalam perhitungan PDB menurut pendekatan produksi, sedangkan yang terakhir digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) menurut pendekatan pendapatan.

Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (*output*) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-antara (*intermediate-input*) menurut harga konstan. Dalam hal ini nilai tambah menurut harga konstan adalah selisih antara keluaran dan masukan-antara menurut harga konstan. Untuk menghitung keluaran dan masukan-antara menurut harga konstannya itu sendiri, dapat digunakan salah satu atau kombinasi dari tiga metode perhitungan pertumbuhan riil sebagaimana baru saja dijelaskan di atas, (revaluasi, ekstrapolasi, atau deflasi). Cara ekstrapolasi langsung dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan, atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai. Metode ini bertolak dari asumsi bahwa keluaran menurut harga konstan berubah sejalan

dengan masukan menurut harga konstan, dengan perkataan lain nisbah masukan-antara (*intermediate-input ratio*) riil dianggap tetap.

Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku. Secara tersirat metode ini berasumsi bahwa inflasi yang terjadi pada keluaran sama dengan inflasi masukan-antara. Metode deflasi komponen pendapatan dilakukan dengan cara mendeflasikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah tersebut, yakni pendapatan tenaga kerja, modal dan manajemen. Metode ini hanya cocok bila komponen nilai tambah terutama terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan penyusutan, dan biasanya diterapkan untuk sektor-sektor tertentu di mana ketiga metode sebelumnya sukar diterapkan.

2.1.5. Pengertian Pendapatan

Setiap manusia yang bekerja baik itu sebagai tenaga buruh harian, pegawai negeri sipil, para pengusaha, para praktisi dan lain-lain sebagainya secara rasional memerlukan uang yang bersumber dari pendapatan yang dihasilkan sebagai balas jasa dari jerih payah sebagai pekerja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian pendapatan secara umum merupakan balas jasa dari hasil pekerjaan.

Pengertian ini pula masih belum lengkap, karena banyak pakar dibidang ekonomi memberikan pengertian pendapatan yang berbeda-beda. Untuk lebih

jelasnya tentang pengertian pendapatan, maka menurut Winardi dalam kamus ekonomi (1998 ; 245), mengatakan sebagai berikut :

“Income seperti dipergunakan dalam ilmu ekonomi teoritika, adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Bila digunakan dalam bidang pembukuan maka pengertian pendapatan luas yaitu pada umumnya pendapatan sebuah perusahaan atau individu”.

Kalau disimak pengertian pendapatan menurut Winardi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pendapatan itu berupa hasil yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari balas jasa pekerjaan atau karena adanya balas jasa dari penyewaan barang-barang modal sehingga seseorang itu memperoleh pendapatan. Akan tetapi lain halnya pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh Paul A. Samuelson (Sudarman Ari 2001 ; 214) mengatakan :

“Pendapatan merupakan total uang yang diperoleh atau yang terkumpul dalam suatu periode tertentu dan perlu dibedakan dalam kekayaan. Di mana kekayaan diartikan sebagai persediaan netto aktiva harta nyata dan harta keuangan milik seseorang atau suatu keluarga pada suatu saat tertentu”.

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh pakar ekonomi moderen ini, sebenarnya terdiri dari dua aspek pengertian pendapatan. Aspek pertama pendapatan dilihat dari aspek rumah tangga konsumen dan pendapatan yang dilihat dari rumah tangga produsen. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai arah yang sama.

Pada perinsipnya pendapatan tersebut dapat pula dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menurut Lincolin Arsyad (1999 ; 16), mengatakan :

“Pendapatan nasional adalah merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (negara) dalam jangka waktu satu tahun. Serta di dalam perhitungannya menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pendekatan pengeluaran”.

Dalam pengertian ini, analisa pendapatan nasional dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan jalan penjumlahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan setiap sektor produktif dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jumlah nilai produksi ini disebut *gross domestic product*. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan pendapatan itu sendiri dan yang ke tiga yaitu pendekatan pengeluaran di mana pendekatan ini dilakukan dengan jalan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat akan dibelanjakan atau di konsumsikan pada berbagai barang dan jasa.

2.1.6. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto tidak terlepas dari yang namanya Gros nasional produk (GNP) adalah indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara sedangkan untuk suatu daerah maka yang menjadi indikatornya yaitu produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan teori ekonomi makro, apa bila pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah di atas 5 % maka negara atau daerah tersebut tergolong maju perekonomiannya. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, cara yang di gunakan adalah dengan menghitung nilai produk netto barang dan jasa yang di hasilkan di suatu daerah. Hasil perhitungan ini biasanya disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB) Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah seluruh nilai netto barang dan jasa

(komoditi) yang di produksi dalam satu wilayah domestik tanpa memperhatikan pemilikan faktor faktor produksinya. Nilai PDRB dapat di lihat dari tiga pendekatan yaitu:

1. Segi produk, PDRB merupakan jumlah netto atas barang dan jasa yang di hasilkan oleh unit unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa pendapatan yang di terima oleh faktor faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang di lakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, infestasi serta ekspor netto (setelah dikeluarkan impornya) biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun)

Manfaat dan kegunaan data PDRB:

1. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian satu daerah.
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian satu daerah.
3. Sebagai salah satu indikator mengenai tingkat kemakmuran.
4. Untuk mengetahui tingkat perubahan harga.

PDRB adalah merupakan gabungan dari sector yang menjadi sumber sumber pendapatan. Oleh sebab itu, di dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah harus di upayakan peningkatan peningkatan pada berbagai sektor

kegiatan pembangunan ekonomi. Untuk menghitung PDRB pada skala nasional maupun daerah, yaitu di dasarkan pada dua pendekatan yaitu perhitungan melalui pendekatan harga konstan yaitu perhitungan terhadap jumlah pendapatan nasional maupun daerah dalam nilai rupiah dan berguna untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun, sedangkan perhitungan berdasarkan harga berlaku adalah perhitungan jumlah pendapatan nasional atau daerah melalui presentase masing masing sumber pendapatan dan berguna untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi yang di hasilkan oleh satu daerah.

2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Pada suatu negara yang baik perekonomiannya maka yang dilihat adalah seberapa besar pertumbuhannya dan dari pertumbuhan ekonomi tersebut juga yang menjadi tolok ukur ialah tingkat kesempatan kerja yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang dimaksud.

Oleh karena itu, pengertian kesempatan kerja tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Di Indonesia pengertian tenaga kerja atau manpower mulai sering dipergunakan. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur, tiap – tiap Negara memeberikan batasan umur yang berbeda. India misalnya menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka pengertian tenaga kerja menurut Negara india yaitu tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun sedangkan orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Amerika serikat mula – mula menggunakan batas umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimum. Kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikan menjadi 16 tahun. Jadi diamerika serikat, yang dinamakan tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 16 tahun atau lebih, sedangkan mereka yang berumur dibawah 16 tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Tujuan dari pemilihan batasan umur tersebut adalah supaya defenisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap-tiap Negara memili batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja dimasing-masing negara juga berbeda.

Di Indonesia dipilih batasan umur minimum 10 tahun tanpa batasan umur maksimum dengan demikian tenaga kerja diindonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Penduduk yang berumur dibawah 10 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang berumur muda terutama di desa – desa yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Misalnya pada tahun 1971, diantara penduduk kota dalam batas umur 10 -14 tahun terdapat 7,1 % yang tergolong bekerja atau mencari pekerjaan sedangkan diantara penduduk desa terdapa 18%. Dengan kata lain, sekitar 16% penduduk kota dan desa dala kelompok umur 10 sampai 14 tahun ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan. Dalam tahun 1980, jumlah ini turun menjadi 11%.

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi akan berkurang. Bila wajib sekolah untk sekolah dasar diterapkan, maka anak – anak sampai dengan umur

1,3 tahun akan berada disekolah. Dengan kata lain jumlah penduduk yang bekerja dalam batas umur tersebut akan menjadi lebih kecil sehingga batas umur minimum lebih tepat dinaikan menjadi 14 tahun.

Berdasarkan pada usulan tersebut diatas, maka pengertian tenaga kerja menurut payaman J. simanjuntak (1987 ; 2) mengatakan sebagai berikut :

“Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir pencari kerja, bersekolah dan yang mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.”

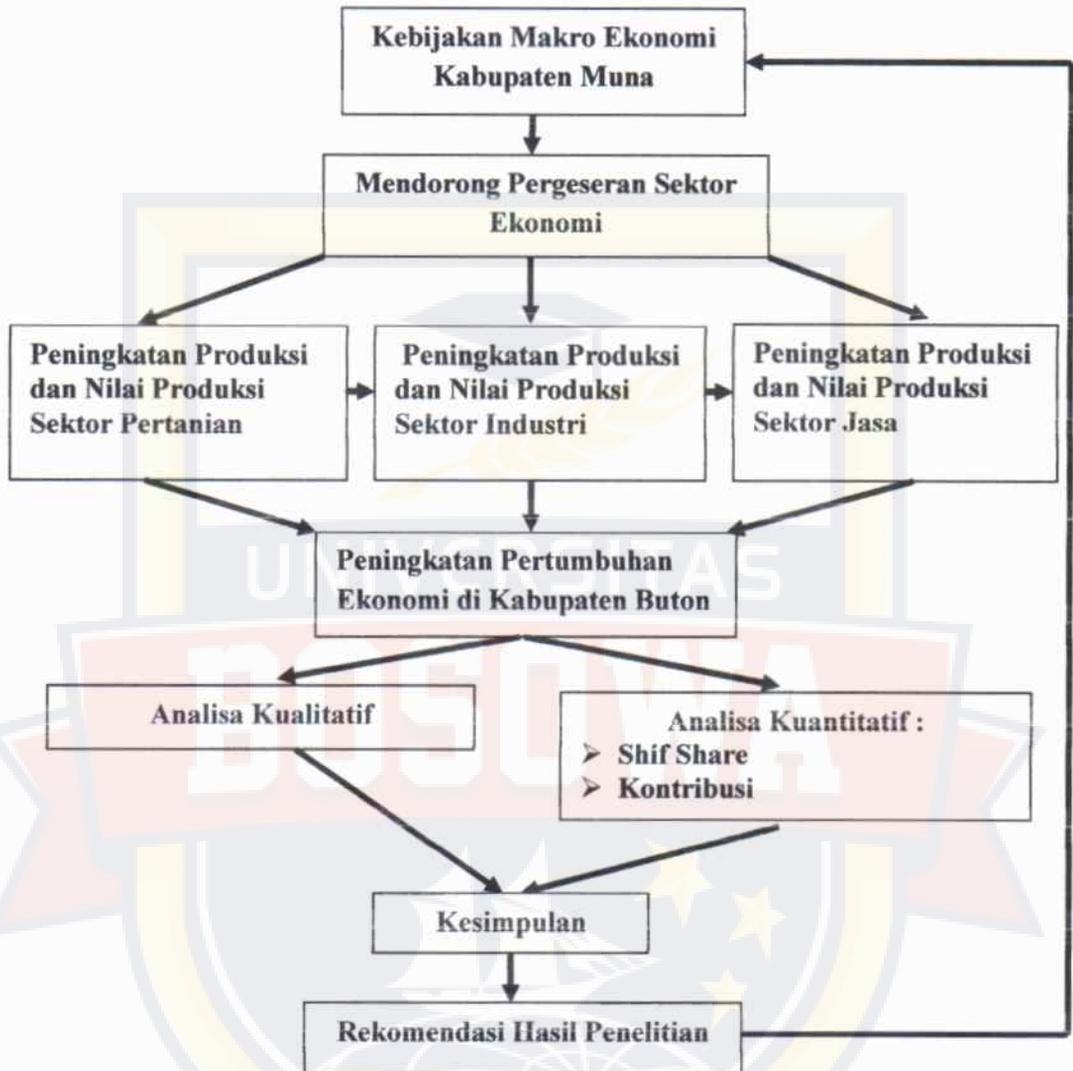
Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka dapat juga dikatakan bahwa tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari:

- (1) Golongan orang yang Bekerja
- (2) Golongan orang yang Menganggur dan mencari Pekerjaan

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari :

- (1) Golongan Yang Bersekolah
- (2) Golongan yang mengurus Rumah Tangga, dan
- (3) Golongan lain – lain atau penerima Pendapatan.

2.2. Kerangka Pikir



2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi hipotesis dalam penulisan ini yaitu : “Diduga kontribusi sektor pertanian yang masih terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna dari tahun 2006 hingga tahun 2010 di Kabupaten Muna.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data di Kabupaten Muna dan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada Kantor Biro Pusat Statistik dan kantor badan perencanaan daerah (BAPEDA) Adapun alasan penulis memilih Kabupaten Muna, karena kemajuan pembangunan ekonominya relatif lambat dibandingkan di Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun waktu penelitian yang penulis butuhkan dalam pengumpulan data yaitu dari awal bulan Februari hingga akhir bulan April 2012.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian, yaitu pada Kantor Biro Pusat Statistik dan Kantor Dinas badan perencanaan daerah di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekaligus melakukan pengamatan dan wawan cara langsung dengan para karyawan lapangan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library Research*) Metode ini dilakukan untuk memperoleh (*refrence*) dengan membaca berbagai literatur kepustakaan yang

erat hubungannya dengan pembahasan penelitian ini guna memperoleh landasan teori yang digunakan.

3.3. Jenis dan Sumber data

3.3.1. Jenis data

1. Data kuantitatif, data diperoleh dalam bentuk angka-angka berupa data jumlah nilai produk domestik regional bruto (PDRB), serta data-data lainnya yang dianggap penting sebagai bahan analisis.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari para karyawan dan karyawan dari Kantor Biro Pusat Statistik dan Kantor Dinas badan perencanaan daerah di Kabupaten muna yang bertugas dibagian lapangan

3.3.2. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengedarkan angket/daftar pertanyaan baik kepada para karyawan Kantor Biro Pusat Statistik dan Kantor Dinas badan perencanaan daerah dengan cara pengambilan sampel berdasarkan teknik proporsional random sampling di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau bersumber dari dinas terkait seperti Kantor Biro Ptatistik, Kator Dinas badan perencanaan daerah Kabupaten Muna dan dari majalah, serta surat kabar.

3.4. Metode Analisis

Untuk menguji sampai sejauhmana kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan, maka metode analisis yang digunakan yaitu :

a. Metode Kualitatif

Yaitu metode analisis yang bersifat monografis di mana hanya menguraikan gambaran umum Kabupaten Muna dan batas-batas wilayah serta gambaran jenis-jenis komoditas tanaman pada sektor pertanian dan jenis-jenis industri serta jenis-jenis sektor jasa yang terdapat di daerah ini.

b. Analisis Kuantitatif

Dalam menganalisis kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muna, maka penulis menggunakan metode analisis yaitu :

Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna. Adapun rumus yang dimaksud yaitu :

$$S_j = \frac{y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Besaran kontribusi Sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muna (%)

y_j = Nilai kontribusi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muna (Rp)

Y = Seluruh nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna (Rp)

3.5. Defenisi Operasional

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan jelas, maka perlunya suatu pembatasan pengertian terhadap variabel-variabel analisis yang digunakan.

Adapun batasan pengertian yang dimaksud yaitu :

1. S_j yaitu jumlah besaran nilai yang akan dicari dan merupakan kontribusi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muna yang dinyatakan dalam (%).
2. y_j yaitu jumlah nilai produksi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Muna yang nialainya diakumulasi dalam satu tahun tertentu yang dinyatakan dalam (Rp).
3. Y yaitu jumlah seluruh nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna yang dinyatakan dalam (Rp).
4. Kontribusi adalah sumbangan dari setiap aktivitas kegiatan baik dalam bentuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan non ekonomi yang dinyatakan dalam (%).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Muna

Berdasarkan sejarah Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten yang tertua di Provinsi Sulawesi Tenggara dari informasi yang penulis dapatkan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton adalah satu rumpun dari Kerajaan Keraton Buton. Secara ringkas sejarahnya yaitu Raja Keraton Buton mempunyai dua anak satu putra dan satu putri. Anak tertua putra berpindah ke Pulau Muna untuk mendirikan kerajaan di Kabupaten Muna, sedangkan sang putri tetap berdomisili di Kabupaten Buton. Berdasarkan sejarah singkat Kabupaten Muna, maka dapat dikatakan antara kedua kabupaten tersebut pada dasarnya bersaudara. Berdasarkan kondisi sejarah tersebut, maka dalam perkembangan geografis Kabupaten Muna telah banyak mengalami perubahan baik dari skala luas wilayah maupun dari jumlah penduduk.

Dari adanya perubahan struktur geografis tersebut di atas, maka Kabupaten Muna luas wilayahnya menjadi berkurang dan demikian pula jumlah penduduknya. Adapun luas wilayahnya yaitu 2.963,97 km². Oleh karena itu suatu wilayah dapat ditinjau secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara geografis, Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terletak dipulau di Pulau Muna bagian Utara dan sebagian Pulau Buton bagian utara, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya.

Sedangkan secara Astronomis, Kabupaten Muna berada pada posisi $4^{\circ}15'$ Lintang Selatan - $4^{\circ}30'$ Lintang Selatan serta $122^{\circ}15'$ Bujur Timur - $123^{\circ}00'$ Bujur Timur.

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Muna maka perinciannya yaitu :

TABEL 4.1.
LUAS WILAYAH KABUPATEN MUNA DIRINCI BERDASARKAN
KECAMATAN TAHUN 2012

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)	Presntase (%)
1	Tongkuno	440,98	14,88
2	Tongkuno Selatan	57,26	1,93
3	Parigi	123,76	4,18
4	Bone	130,09	4,39
5	Marobo	41,37	1,40
6	Kabawo	204,94	6,91
7	Kabangka	97,62	3,29
8	Kontu Kowuna	70,56	2,38
9	Tiwono Kepulauan	77,90	2,63
10	Maginti	40,57	1,37
11	Tiwono Tengah	82,35	2,78
12	Tiwono Selatan	66,98	2,26
13	Tiwono Utara	62,05	2,09
14	Lawa	65,17	2,87
15	Sawerigadi	102,60	3,46
16	Barangka	33,09	1,12
17	Wadaga	175,05	5,91
18	Kusambi	103,33	3,49
19	Kontunaga	50,88	1,72
20	Watupute	100,12	3,38
21	Katobu	12,88	0,43
22	Lohia	49,81	1,68
23	Duruka	11,52	0,39
24	Batalaiworu	22,71	0,77
25	Napabalano	105,47	3,56
26	Lasalepa	107,92	3,64
27	Napano Kusambi	77,19	2,60
28	Towea	29,02	0,98
29	Wakaorumba Selatan	95,00	3,21
30	Pasir Putih	89,53	3,02
31	Pasi Kolaga	48,77	1,65
32	Maligano	98,09	3,31
33	Batukara	69,39	2,34
Luas Wilayah Muna		2.963,97	100,00

Sumber Data : Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali Tahun 2012

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak Kecamatan Tongkuno yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muna dengan luas 440,98 km². Dari data yang penulis peroleh kecamatan ini merupakan kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya dan juga banyak ditemukan perkebunan sayur-sayuran dan juga perkebunan buah-buahan seperti langsung, rambutan dan buah-buahan lainnya.

4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Muna

Banyaknya jumlah penduduk pada suatu negara adalah suatu modal dasar bagi negara tersebut jika penduduk yang dimilikinya itu memiliki keahlian atau skill. Akan tetapi akan menjadi bencana besar jika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak tetapi skill dari penduduk tersebut sangat rendah atau dibawa rata-rata negara lain karena akan tercipta pengangguran besar-besaran dan akan tercipta kriminalitas yang sangat tinggi pada negara tersebut.

Oleh karena itu setiap negara berusaha menerapkan suatu kebijakan tentang kependudukan agar masyarakat mau sadar akan pentingnya mengurangi angka kelahiran bayi dan mau sadar menghindari nikah dini. Untuk di Indonesia dalam upaya mengurangi jumlah angka pertumbuhan penduduk menerapkan suatu kebijakan yaitu program keluarga berencana dengan semboyan dua anak cukup. Kebijakan pemerintah ini di keluarkan karena negara Indonesia adalah salah satu negarayang paling besar jumlah penduduknya didunia setelah negara Cina dan India. Untuk tahun sekarang saja telah mencapai empat ratus juta lebih dan hal ini sangat memprihatinkan jika pemerintah tidak sesegera mungkin mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk yang begiti cepat tersebut.

Untuk mengantisipasi tingginya angka kelahiran bayi dan angka ibu hamil, maka pemerintah Indonesia dengan program keluarga berencana tersebut berusaha menerapkan kebijakan ini disetiap daerah kabupaten/kota sampai ke tingkat pelosot desa, sebagaimana pula yang diterapkan di Kabupaten Muna.

Program keluarga berencana di Kabupaten Muna dapat dikatakan cukup berhasil karena sebagai indikatornya yaitu perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2.
PERKEMBANGAN ANGKA JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN
MUNA TAHUN 2006 – 2010

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2006	290.358	
2007	243.397	-16,17
2008	246.004	1,07
2009	245.113	-0,36
2010	247.343	0,91
Rata-rata	181745	-3,64

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali Tahun 2012

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak jumlah penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2006 jumlah penduduknya yaitu sebanyak 290.358 jiwa dan pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Muna berjumlah 243.397 jiwa hal ini berarti terjadi penurunan penduduk dari tahun 2006 ke tahun 2007. Turunnya jumlah penduduk yaitu sebesar 46.961 jiwa dan hal ini merupakan suatu

hal yang luar biasa dan perkembangan penurunan angka jumlah penduduk di Kabupaten Muna yaitu sebesar -16,17 %. Selanjutnya pada tahun 2008 jumlah penduduk di Kabupaten Muna naik kembali menjadi sebanyak 246.004 jiwa atau kenaikan jumlah penduduk di kabupaten ini yaitu sebanyak 2.607 jiwa atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 1,07 %. Pada tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Muna menurun kembali yaitu menjadi 245.113 jiwa atau penurunannya yaitu sebesar 891 jiwa atau perkembangan penurunannya yaitu sebesar -0,36 %. Dan selanjutnya pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Muna meningkat kembali menjadi sebanyak 247.343 jiwa atau kenaikannya yaitu sebanyak 2.230 jiwa atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 0,91 %. Sedangkan rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten muna dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebanyak 181.745 jiwa per tahun dengan rata-rata perkembangan -3,64 % per tahun.

Kalau di analisa data jumlah penduduk di Kabupaten Muna tersebut, maka dapat dikatakan program keluarga bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna cukup berhasil. Hal yang dapat dijadikan sebagai suatu keberhasilan yaitu angka jumlah penduduk pada tahun 2006 ke tahun 2007 sangat drastis penurunannya. Dan adapun kenaikan pada tahun selanjutnya juga dapat dikatakan belum berarti karena angka kenaikan umlah penduduk tidak melewati jumlah penduduk pada tahun 2006 tersebut.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, juga dapat dikatakan kinerja dinas terkait seperti dinas kesehatan dan khususnya Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan tugas untuk menurunkan jumlah

penduduk di Kabupaten Muna sangat berhasil. Hal tersebut terbukti, karena dari hasil survei penulis dan disaat penulis melakukan wawancara langsung dengan para ibu-ibu hamil di posiandu di balai desa, mereka menjawab hampir 2 kali seminggu para karyawan dan karyawan BKKB dan dari Kantor Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya memberi sosialisasi dan nasehat kepada mereka tentang pentingnya mengikuti program keluarga berencana guna mencapai keluarga sejahtera

4.3. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Muna

Berdasarkan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Muna serta sebagaimana yang penulis telah jelaskan di atas, sektor pertanian di Kabupaten ini perkembangannya cukup lumayan baik. Sesuai dalam teori ekonomi mikro bahwa apabila permintaan terhadap sesuatu barang melebihi dari kapasitas produksi maka harga dari barang dan jasa tersebut akan mengalami peningkatan (asumsi).

Oleh karena itu, peningkatan nilai produksi barang sektor hasil pertanian yang terdapat di Kabupaten Muna, pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku konsumsi masyarakat akan barang hasil-hasil pertanian sehingga pada kondisi barang tersebut jumlahnya terbatas maka secara otomatis terjadi kenaikan harga dan apabila terjadi kenaikan harga barang hasil pertanian akan berdampak pada peningkatan produksi atau dalam istilah ekonomi dinamakan peningkatan penawaran (*supply*). Terjadinya peningkatan harga atau nilai sektor pertanian, di satu sisi mendorong produktivitas petani guna menghasilkan barang-barang sektor pertanian dan di sisi lain mendorong peningkatan pendapatan petani.

Akan tetapi pada dasarnya peningkatan produktivitas para petani, bukan hanya dilihat dari bagaimana kenaikan dari harga-harga hasil pertanian akan tetapi lebih dari itu juga harus didukung oleh penerapan teknologi tepat guna, penggunaan bibit unggul, dan penggunaan lahan pertanian yang lebih luas, serta apabila hal tersebut di atas dapat mendukung maka secara otomatis kehidupan para petani akan lebih sejahtera.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka di Kabupaten Muna perkembangan nilai produk sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami terus peningkatan di mana pada tahun 2006 nilai produksi sektor pertanian berdasarkan harga konstan yaitu sebesar Rp. 574.786.270 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 830.453.220 juta. Untuk mengetahui lebih jelas nilai produksi sektor pertanian dari tahun 2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.3.
NILAI PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN BERDASARKAN HARGA
KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 – 2010
(JUTAAN RUPIAH)

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Perkembangan (%)
2006	574.786.270	-
2007	632.942.680	10,12
2008	768.477.220	21,41
2009	808.525.210	5,21
2010	830.453.220	2,71
Rata-rata	723.036.920	9,86

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali Tahun 2012

Berdasarkan data tersebut di atas, nampak pada tahun 2006 nilai produksi sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 574.786.270 dan pada tahun 2007 meningkat

menjadi sebesar Rp. 632.942.680 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 10,12 %. Selanjutnya pada tahun 2008 nilai produksi sektor pertanian meningkat menjadi sebesar Rp. 768.477.220 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 21,41%. Pada tahun 2009 nilai produksi sektor pertanian di Kabupaten Muna meningkat lagi yaitu menjadi sebesar Rp. 808.525.210 juta atau tingkat perkembangannya menjadi sebesar 5,21 %. Selanjutnya pada tahun 2010 nilai produksi sektor pertanian meningkat drastis menjadi sebesar Rp. 830.453.220 atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 2,71% sedangkan nilai rata-rata produksi yaitu Rp. **723.036.920** juta per tahun selama lima tahun sedangkan rata-rata tingkat perkembangannya yaitu sebesar **9,86 %** per tahun.

Kalau di analisa data tersebut di atas, secara nyata bahwa di Kabupaten Muna kemajuan sektor pertanian semakin baik perkembangannya karena baik dilihat dari nilai produknya secara riil atau nyata mengalami terus kenaikan yang sangat berarti sedangkan tingkat perkembangannya juga demikian. Adanya kenaikan nilai produksi sektor pertanian di Kabupaten Muna berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari Kantor Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yaitu adanya pengwilayahan komoditas di mana perkebunan jagung baik jagung brondong maupun jagung kuning biasa mengalami peningkatan produksi yang semakin besar dan juga pada sektor pertanian di mana budidaya rumput laut semakin dikembangkan dan selain itu pula, perhatian pemerintah di dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan baik pada pertanian tanaman pangan maupun perkebunan dan termasuk pada penyuluhan budidaya rumput laut. Sehingga dengan dasar

inilah maka Kabupaten Muna dijadikan sebagai salah satu kabupaten percontohan bagi kabupaten lainnya yang mampu mensuply beberapa jenis komoditi pertanian baik pada pasar regional, maupun pada pasar internasional.

Peningkatan pemasaran produksi hasil-hasil pertanian Kabupaten Muna baik pada pasar regional maupun pada pasar internasional tidak terlepas pula peranan dari Kantor Dinas Perdagangan dan Kamar Dagang Kabupaten Muna yang selalu melakukan promosi-promosi tentang keunggulan hasil komoditas pertanian Kabupaten Muna yang merupakan suatu kearifan lokal yang perlu dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang diupayakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

4.4. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Pertambangan di Kabupaten Muna

Pada pembahasan sektor ini, penulis akan mengkaji jenis-jenis pertambangan yang terdapat di Kabupaten Muna. Adapun jenis-jenis pertambangan yang terdapat di Kabupaten Muna yaitu rata-rata tambang golongan C yang meliputi galian pasir, batu kerikil, sertu, dan batu gunung. Dari ke empat jenis pertambangan yang terdapat di Kabupaten Muna tersebut, rata-rata memiliki nilai produksi yang relatif cukup besar karena permintaan akan jenis tambang ini dari tahun ke tahun semakin besar.

Besarnya permintaan akan jenis tambang ini disebabkan oleh semakin meningkatnya animo masyarakat untuk membangun perumahan dan rumah pribadi, membangun prasarana jalan dan saluran air hujan dan pembangunan lainnya. Berdasarkan tingginya permintaan akan jenis tambang ini, maka

produktivitas masyarakat untuk melakukan penggalian semakin besar sehingga pendapatan para petambang juga ikut meningkat.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, nilai produksi sektor pertambangan di Kabupaten Muna pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 18.338,01 juta sedangkan pada tahun 2010 berjumlah sebesar Rp. 22.145.11 juta dan untuk mengetahui lebih jelas kenaikannya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

TABEL 4.4.
NILAI PRODUKSI SEKTOR PERTAMBANGAN ATAS DASAR HARGA
KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 - 2010
(JUTAAN RUPIAH)

Tahun	Nilai Produksi (Rp.)	Perkembangan (%)
2006	18.338,01	-
2007	20.063,71	9,41
2008	21.511,11	7,21
2009	21.914,35	1,87
2010	22.145.11	1,05
Rata-rata	20.794,46	4,89

Sumber : Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali tahun 2012

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 nilai produksi sektor pertambangan di Kabupaten Muna yaitu sebesar Rp. 18.338,01 juta dan tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 20.063,71 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 9,41 %. Selanjutnya pada tahun 2008 nilai produksi sektor pertambangan di Kabupaten Muna meningkat menjadi sebesar Rp. 21.511,11 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 7,21 %. Pada tahun 2009 nilai produksi sektor pertambangan di Kabupaten Muna meningkat

kembali menjadi sebesar 21.914,35 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 1,87 % dan pada tahun 2010 nilai produksi sektor pertambangan di Kabupaten Muna meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 22.145,11 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 1,05 %. Sedangkan rata-rata nilai produksi selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 20.794,46 juta per tahun dan tingkat perkembangannya rata-rata sebesar 4,89 % per tahun.

Kalau di analisa data nilai produksi sektor pertambangan secara riil mengalami terus peningkatan nilai produksi, dari tahun 2006 hingga tahun 2010, yang walaupun tingkat perkembangannya mengalami penurunan mulai dari tahun 2008 ke tahun 2009 hingga tahun 2010. Adanya penurunan nilai produksi dari tahun 2007 ke tahun 2008 hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perubahan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yaitu menyangkut perubahan perda tentang pajak tambang galian C di mana pemerintah Kabupaten Muna menaikkan jenis pungutan pajak tersebut.

4.5. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Kabupaten Muna

Sebagaimana dalam program pembangunan yang berkelanjutan yang dikenal dengan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita), di mana Indonesia sebagai negara agraris mengupayakan agar dengan hasil sektor pertanian yang berlimpah diharapkan mampu menopang sektor industri dalam negeri. Artinya dari aspek agribisnis hasil produksi sektor pertanian disamping mampu dipasarkan di dalam negeri dan juga di pasar luar negeri, juga diharapkan menjadi bahan baku (input) bagi sektor industri (agri industri) dalam negeri sehingga hasil pertanian tersebut memiliki nilai tambah produksi.

Agar program keterkaitan antar sektor (*inter linkage*) dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka tentunya pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus menerapkan atau merumuskan terobosan baru guna menopang kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa rumusan kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna mendukung program tersebut antara lain peranan pihak perbankan sebagai lembaga finansial yang mampu memberi bantuan modal sektor industri kemudian dinas-dinas terkait dan termasuk kadin juga diharapkan lebih berperan aktif di dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk strategi produksi yang baik, manajemen usaha yang baik serta sistem pelaporan keuangan yang baik pula dalam bentuk pemberdayaan sektor riil usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha gebrakan semacam ini perlu diterapkan guna memberikan pemahaman bisnis kepada para pengusaha sehingga usaha-usaha mereka dapat berjalan terus atau berkelanjutan sehingga di dalam pengembalian utang kredit dari perbankan dapat dipenuhi dan pada akhirnya kepercayaan dunia perbankan sebagai lembaga finansial terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini menurun dapat berubah menjadi suatu kepercayaan yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri disamping sektor pertanian yang mampu mendorong perkembangan sektor riil disetiap daerah kabupaten/kota dan juga tidak dapat dipisahkan dari sektor perbankan dalam memberikan kredit modal usaha yang tentunya dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah sehingga dunia sektor riil dapat hidup dan lebih dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga disamping mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah

kabupaten/kota yang lebih baik. Oleh karena itu, secara garis besar interkoneksi sektor harus dapat berjalan pada suatu daerah dan ditambah lagi dengan deregulasi kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada usaha kecil maka perkembangan sentra industri pasti akan lebih maju dan berkembang.

Upaya-upaya guna mendorong perkembangan industrialisasi sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas, pada dasarnya pemerintah Kabupaten Muna telah melaksanakan dan bahkan telah mengeluarkan berapa kebijakan guna mendorong perkembangan sektor riil tersebut. Kebijakan tersebut antara lain kemudahan dalam pemberian izin usaha, promosi-promosi usaha baik pada pasar regional dan juga pasar internasional serta sebagai fasilitator antara dunia usaha dengan dunia perbankan. Berdasarkan pada gebrakan pemerintah Kabupaten Muna tersebut di atas, maka dapat dikatakan relatif cukup berhasil guna mendorong perkembangan dan pertumbuhan sentra-sentra industri kecil, menengah dan besar. dan untuk mengetahui perkembangannya yaitu : :

TABEL 4.5.
NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI ATAS DASAR HARGA
KONSTAN DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 - 2010
(JUTAAN RUPIAH)

Tahun	Nilai Produksi (Rp.)	Perkembangan (%)
2006	62.651.510	-
2007	72.516.540	15,75
2008	84.966.770	17,17
2009	98.770.230	16,25
2010	113.440.520	14,85
Rata-rata	86.469.114	16,00

Sumber : Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali tahun 2012

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2006 jumlah nilai produksi sektor industri di Kabupaten Muna yaitu sebesar Rp. 62.651.510 juta dan pada tahun 2007 jumlah nilai produksi sektor industri meningkat menjadi sebesar Rp. 72.516.540 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 15,75 %. Pada tahun 2008 jumlah nilai produksi sektor industri di Kabupaten Muna meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 84.966.770 atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 17,17 %. Selanjutnya pada tahun 2009 nilai produksi sektor industri di Kabupaten Muna meningkat menjadi sebesar Rp. 98.770.230 atau tingkat perkembangannya meningkat menjadi sebesar 16,25 % sedangkan pada tahun 2010 jumlah nilai produksi sektor industri di Kabupaten Muna meningkat menjadi sebesar Rp. 113.440.520 atau tingkat perkembangannya meningkat menjadi sebesar 14,85 %. Kalau dilihat dari rata-rata nilai produksi sektor industri selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 86.469.114 atau dengan tingkat perkembangannya sebesar 16,00 % per tahun.

Kalau di analisa penjelasan data tersebut di atas, secara nyata bahwa perkembangan sektor industri di Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami terus perkembangan hal ini dapat dibuktikan dari nilai riil sektor industri mengalami kenaikan termasuk tingkat perkembangannya. Dan oleh karena itu, maka dapat dikatakan program pemerintah Kabupaten Muna di dalam mensinerjikan antara sektor pertanian dengan sektor industri cukup berhasil. Argumentasi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Muna, di mana produksi sektor industri khususnya industri kerajinan tenunan khas adat Kabupaten Muna dan industri rumah tangga

anyaman telah menembus pasar interinsuler dan pasar internasional. Dengan kondisi ini menurut Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Muna bahwa produksi anyaman daun lontar dalam bentuk topi, tas dan asesoris lainnya terus mengalami peningkatan dan secara tidak langsung di satu sisi dapat meningkatkan produktivitas para pengrajin anyaman dan termasuk tingkat pendapatan para pengrajin dan di sisi lain pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak dan pungutan retribusi juga mengalami peningkatan yang berarti, sehingga peranan sektor industri di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna dapat dikatakan cukup berhasil.

4.6. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Jasa Kabupaten Muna

Sektor jasa adalah salah satu sektor yang juga dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan sektor jasa ini pula, yang mampu memberikan ruang gerak terhadap sektor lain guna lebih mendorong tingkat produktivitasnya. Banyak dinegara-negara maju yang sumberdaya alamnya terbatas tetapi pertumbuhan ekonominya justru lebih maju ketimbang negara yang kaya akan sumberdaya alamnya seperti misalnya Negara Singapura. Negara ini begitu pesat pertumbuhan ekonominya di kawasan Asia, hal ini disebabkan oleh peranan sektor jasa di negara Singapura sangat besar perannya bahkan beberapa negara eropa juga dikalahkan tingkat pertumbuhan ekonominya.

Perkembangan sektor jasa di satu sisi juga mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja dan disisi lain mampu memberikan kontribusi yang besar baik di dalam pertumbuhan ekonomi maupun di dalam mendorong sektor ekonomi lainnya untuk lebih maju. Bercermin pada keberhasilan Negara Singapura yang

sukses mendorong perkembangan sektor jasa, maka seharusnya Indonesia lebih maju tingkat perekonominya di banding negara tersebut. Alasannya adalah karena negara Indonesia didukung oleh kekayaan sumberdaya alam yang sangat berlimpah sehingga yang menjadi persoalan adalah kenapa negara Indonesia justru sektor jasanya perkembangannya agak melambat, maka jawabannya adalah terletak pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu berfokus pada sektor pertanian dan sektor industri padahal sektor jasa justru yang mampu memberikan andil besar baik di dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, agar sektor jasa di Indonesia dapat lebih maju dan berkembang maka deregulasi dibidang perbankan harus ditinjau ulang termasuk tentang perkembangan pariwisata dan perhotelan, transportasi, restoran dan lain-lain sehingga dengan adanya perubahan deregulasi dibidang jasa sedikit banyaknya mampu memberikan perubahan yang signifikan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Muna telah banyak melakukan perubahan-perubahan deregulasi dibidang sektor jasa khususnya pada bidang jasa transportasi, perhotelan pemerintahan, dan jasa-jasa lainnya. Dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Muna pada tahun 2006 nilai produksi sektor jasa yaitu sebesar Rp. 702.232.660 juta dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.507.374.900 juta dan untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
NILAI PRODUKSI SEKTOR JASA ATAS DASAR HARGA KONSTAN DI
KABUPATEN MUNA TAHUN 2006 - 2010 (JUTAAN RUPIAH)

Tahun	Nilai Produksi (Rp.)	Perkembangan (%)
2006	70.223.266	-
2007	84.123.592	19,79
2008	106.004.786	26,01
2009	126.661.767	19,49
2010	150.737.490	19,01
Rata-rata	107.550.180,2	21,07

Sumber : Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali tahun 2012

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2006 jumlah nilai produksi sektor jasa di Kabupaten Muna yaitu sebesar Rp. 70.223.266 juta dan pada tahun 2007 nilai produksi sektor jasa yaitu sebesar Rp. 84.123.592 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 19,79 % dan pada tahun 2008 nilai produksi sektor jasa di Kabupaten Muna meningkat menjadi sebesar Rp. 106.004.786 juta atau tingkat perkembangannya yaitu hanya sebesar 26,01 % dan hal ini berarti mengalami peningkatan perkembangan yaitu sebesar 6,22 %. Adanya peningkatan perkembangan nilai produksi sektor jasa di Kabupaten Muna disebabkan oleh dilonggarkannya deregulasi dibidang transportasi darat dan perisinan pembangunan perhotelan atau wisma/penginapan. Selanjutnya pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat besar karena nilai produksinya yaitu sebesar Rp. 126.661.767 juta atau dengan tingkat perkembangan yaitu sebesar 19,49 %. Selanjutnya pada tahun 2010 nilai produksi sektor jasa di Kabupaten Muna meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 150.737.490 juta atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 19,01 %. Sedangkan rata-rata

nilai produksinya selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 107.550.180,2 per tahun atau dengan tingkat perkembangannya yaitu sebesar 21,07 % per tahun.

Kalau dianalisa data tabel tersebut di atas nampak sangat jelas tingkat perkembangannya mengalami fluktuasi kenaikan khususnya pada tahun 2008 ke tahun 2009. Akan tetapi walaupun demikian, secara nyata nilai produknya terus mengalami peningkatan.

4.7. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna Berdasarkan Harga Konstan

Maju tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah (kabupaten/kota) dapat diukur dari berapa besar nilai produk domestik regional bruto (PDRB) jika ditinjau dari provinsi atau kabupaten/kota sedangkan bila ditinjau dari suatu negara maka yang dilihat atau yang menjadi patokan yaitu *gross domestic product* (GDP) atau *gross national product* (GNP).

Akan tetapi tinggi rendahnya GDP/PDRB bukan pula sebagai tolok ukur utama bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah akan tetapi yang paling utama adalah seberapa besar populasi jumlah penduduk dan seberapa besar distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Dan apabila ke tiga persyaratan tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah yang artinya pertumbuhan ekonomi meningkat laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan (rendah) dan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan merata, maka negara/daerah tersebut dapat dikatakan negara maju atau negara yang masyarakatnya tingkat kesejahteraannya lebih meningkat.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, secara nyata merupakan suatu hal yang mutlak dan merupakan suatu target bagi pemerintah guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, karena pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan ukuran kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi yaitu peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang lebih besar pada tahun-tahun yang akan datang, bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah karena harus dilakukan atau dibarengi dengan berbagai penerapan kebijakan pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi guna mendorong pendapatan perkapita yaitu kebijakan dibidang investasi baik pada investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri pada berbagai sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa serta yang lebih pada padat karya dan bukan pada padat modal.

Kemudian aspek lain kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan dibidang moneter dan perbankan dan kebijakan dibidang perdagangan luar negeri yaitu ekspor dan impor kemudian kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Dari beberapa kebijakan yang telah dikemukakan tersebut di atas secara makro harus dilakukan secara *aggregate* atau menyeluruh artinya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus tanggap terhadap kebijaka-kebijakan yang dikeluarkan sehingga dengan kebijakan tersebut justru tidak menciptakan solusi pemecahan ekonomi akan tetapi justru menciptakan masalah baru dalam suatu

perekonomian, maka para ahli ekonomi mengatakan telah terjadi suatu masalah baru yang disebut *crowding out*.

Beracu pada ulasan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Muna guna merealisasikan pertumbuhan ekonominya ke arah yang lebih baik dan mengalami terus peningkatan, maka berbagai sektor-sektor ekonomi telah dipacu produktivitasnya dalam berbagai kebijakan sehingga pada tahun 2006 nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna yaitu sebesar Rp. 1.456.886.130 juta dan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 2.430.638.299 juta, dan untuk mengetahui kenaikannya dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

TABEL 4.7.
NILAI PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS
DASAR HARGA KONSTAN DI KABUPATEN MUNA
TAHUN 2006 - 2010 (JUTAAN RUPIAH)

Lapangan Usaha	Nilai Prroduksi (Rp.)				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	574.786.270	632.942.680	768.477.220	808.525.210	830.453.220
2. Pertambangan	18.338,01	20.063,71	5.385,24	21.914,35	22.145,11
3. Industri	62.651.510	72.516.540	84.966.770,00	98.770.230	113.440.520
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	13.527.012	14.132.121	14.927.215,00	15.142.741	16.791.022
5. Bangunan	10.085.298	12.060.379	15.468.656,00	18.472.288	22.369.952
6. Perdagangan Hotel & Restoran	27.026.353	33.751.866	43.207.469,50	51.008.970	59.343.441
7. Angkutan & Komunikasi	5.113.700	6.454.923	8.366.547,00	10.455.012	12.922.114
8. Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	12.510.915	13.127.221	14.670.525,00	15.210.533	17.344.575
9. Jasa-jasa Lainnya	25.394.122,50	29.130.490	36.002.340	43.690.170	52.688.424
PDRB	1.456.886.130	1.676.551.900	2.083.880.590	2.250.591.037	2.430.638.299
Perkembangan (%)	-	15,08	24,30	8,00	7,99

Sumber : Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna, Data Diolah Kembali tahun 2012

Berdasar data tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2006 nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna pada tahun 2006 bernilai sebesar Rp. 1.456.886.130 juta dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.676.551.900 juta atau dengan tingkat perkembangan yaitu sebesar 15,08 %. Selanjutnya pada tahun 2008 nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Takalar berdasarkan harga konstan yaitu sebesar 2.083.880.590 atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 24,30 % atau mengalami kenaikan presentase sebesar 9,22 %. Pada tahun 2009 nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Takalar meningkat menjadi Rp. 2.250.591.037 atau tingkat perkembangannya yaitu sebesar 8,00 % atau presentasinya menurun menjadi sebesar -16,30 % dan pada tahun 2010 meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 2.430.638.299 juta atau dengan tingkat perkembangannya yaitu sebesar 7,99 % atau kenaikan presentasinya sebesar 0,01 % sedangkan rata-rata kenaikan perkembangannya dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 13,84 % per tahun.

Kalau di analisa data tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara nyata nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna mengalami terus peningkatan yang sangat berarti dan dengan hal ini pula berarti pemerintah Kabupaten Muna dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonominya hingga mencapai 13,84 % per tahun sangat berhasil.

4.8. Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Muna

Untuk menganalisis berapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna, maka penulis menggunakan analisis kontribusi yang rumusnya telah dikemukakan pada bab terdahulu serta adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut :

a. Analisis Kontribusi Sektor Pertanian

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2006 yaitu : Sj} &= \frac{574.786.270}{1.456.886.130} \times 100 \% \\ &= 39,45 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2007 yaitu : Sj} &= \frac{632.942.680}{1.676.551.900} \times 100 \% \\ &= 37,75 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2008 yaitu : Sj} &= \frac{768.477.220}{2.083.880.590} \times 100 \% \\ &= 36,88 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2009 yaitu : Sj} &= \frac{808.525.210}{2.250.591.037} \times 100 \% \\ &= 35,93 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2010 yaitu : Sj} &= \frac{830.453.220}{2.430.638.299} \times 100 \% \\ &= 34,17 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sektor pertanian tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kabupaten Muna kontribusi sektor pertanian masih relatif besar dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 36,83 % per tahun dan selebihnya 63,17 % disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya.

b. Analisis Kontribusi Sektor Pertambangan

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2006 yaitu : } S_j &= \frac{18.338,01}{1.456.886.130} \times 100 \% \\ &= 1,26 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2007 yaitu : } S_j &= \frac{20.063.710}{1.676.551.900} \times 100 \% \\ &= 1,20 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2008 yaitu : } S_j &= \frac{21.511.110}{2.083.880.590} \times 100 \% \\ &= 1,03 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2009 yaitu : } S_j &= \frac{21.914.350}{2.250.591.037} \times 100 \% \\ &= 0,97 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2010 yaitu : } S_j &= \frac{22.145.110}{2.430.638.299} \times 100 \% \\ &= 0,91 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sektor pertambangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kabupaten Takalar kontribusi sektor pertambangan masih relatif kecil dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 1,07 % per tahun dan selebihnya 98,93 % disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya.

c. Analisis Kontribusi Sektor Industri

$$\text{Untuk tahun 2006 yaitu : } S_j = \frac{62.651.510}{1.456.886.130} \times 100 \% \\ = 4,30 \%$$

$$\text{Untuk tahun 2007 yaitu : } S_j = \frac{72.516.540}{1.676.551.900} \times 100 \% \\ = 4,33 \%$$

$$\text{Untuk tahun 2008 yaitu : } S_j = \frac{84.966.770}{2.083.880.590} \times 100 \% \\ = 4,08 \%$$

$$\text{Untuk tahun 2009 yaitu : } S_j = \frac{98.770.230}{2.250.591.037} \times 100 \% \\ = 4,39 \%$$

$$\text{Untuk tahun 2010 yaitu : } S_j = \frac{113.440.520}{2.430.638.299} \times 100 \% \\ = 4,67 \%$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sektor industri tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kabupaten Takalar kontribusi sektor industri masih relatif rendah dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 4,35 % per tahun dan selebihnya 95,65 % disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya.

d. Analisis Kontribusi Sektor Jasa

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2006 yaitu : S}_j &= \frac{70.223.266}{1.456.886.130} \times 100 \% \\ &= 4,82 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2007 yaitu : S}_j &= \frac{84.123.592}{1.676.551.900} \times 100 \% \\ &= 5,02 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2008 yaitu : S}_j &= \frac{106.004.786}{2.083.880.590} \times 100 \% \\ &= 5,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2009 yaitu : S}_j &= \frac{126.661.767}{2.250.591.037} \times 100 \% \\ &= 5,63 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Untuk tahun 2010 yaitu : } S_j &= \frac{150.737.490}{2.430.638.299} \times 100 \% \\ &= 6,20 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sektor jasa tersebut di atas, maka dapat dikatakan di Kabupaten Takalar kontribusi sektor jasa secara *aggregate* atau menyeluruh masih relatif besar dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 5,35 % per tahun dan selebihnya 94,65 % disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari hasil analisis ini maka dapat dikatakan jika dilihat secara parsial sektor pertanian yang paling terbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di antara sektor-sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Muna. Kemudian disusul oleh sektor sektor jas, industri dan sektor pertambangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan, maka yang yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Selama kurun waktu 2006-2010 produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Muna, sektor pertanian masi merupakan sektor yang paling terbesar nilai produknya di antara sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertambangan, industri, dan sektor jasa-jasa.
2. Nilai Produk domestik regional broto (PDRB) di Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 13,84 %. Sedangkan rata-rata tingkat perkembangan nilai produksi dari seluruh sektor ekonomi yang terdapat pada PDRB Kabupaten Muna yaitu : Untuk sektor pertanian sebesar 9,86 %, pertambangan 4,89 %, Industri 16,00
3. Sektor pertanian di Kabupaten Muna, masih merupakan sektor yang paling besar nilai produksinya dan demikian pula halnya nilai kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dengan rata-rata kontribusinya per tahun selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 36,83 %, kemudian disusul oleh sektor jasa dengan rata-rata tingkat kontribusinya yaitu sebesar 5,53 % dan sektor industri sebesar 4,35 % dan kemudian sektor pertambangan yaitu sebesar 1,07 % per tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Agar nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Muna lebih besar pertumbuhannya pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Muna lebih diproduktifikan terutama aktivitas kegiatan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif atau sebagai sektor basis atau leading sektor. Hal ini penting karena sektor yang unggul akan memberikan perubahan yang positif untuk lebih maju pada sektor ekonomi lainnya yang belum dijadikan sektor unggulan.
2. Agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna lebih maju dan berkembang pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Muna dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) lebih meningkatkan promosi-promosi investasi kepada pihak Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tentang keunggulan-keunggulan sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Muna. Hal ini penting karena dengan cara demikian disamping merangsang aktivitas dan produktivitas kegiatan ekonomilainnya juga mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja.
3. Agar nilai produksi sektor pertanian kontribusinya terhadap PDRB lebih besar pada tahun-tahun akan datang demikian pula sektor-sektor ekonomi lainnya, maka sebaiknya pemerintah melalui dinas terkait lebih

mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur yang banyak dijumpai di Kabupaten Muna. Karena dengan cara ini, maka akan mendorong aktivitas ekonomi lainnya untuk lebih maju dan berkembang seperti sektor jasa pengangkutan, jasa perdagangan dan jasa-jasa lainnya (*interlinkage sector*).



DAFTAR PUSTAKA

- Boediono (1992), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Bengolo, M.T. 1995. *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Jasa Karya, Jakarta
- Faisal Basri, 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Penerbit Erlangga Jakarta
- Irawan dan M. Suparmoko. 1990. *Ekonomika Pembangunan Edisi 5*. Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Jingan, M.L, 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, penerbit. Rajawali press, Jakarta
- Kodhyat H, 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Pendit, Nyoman S, 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT. Radnya Paramita. Jakarta.
- Radiawan, Hari, Hartati, dan Soepomo, SriSadah, 1997/1998. *Pengembangan Ekonomi*. Penerbit Tarsito Bandung.
- Radiawan, Hari, Hartati, dan Soepomo, SriSadah, 1997/1998. *Pengembangan Ekonomi*, Penerbit Tarsito Bandung.
- Sadono Sukirno, 1994. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Radja Grafindo Persada Jakarta
- Sudarsono, 1982. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit, LP3ES, Jogyakarta
- Sumitro Djojohadikusumo, 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit, Gramedia Jakarta
- Sistem Linkage 1999. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Simanjuntak, 1990, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Tadang Ambar, 1989, *Ekonomi Pembangunan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Tallasa Tjoy, 1991, *Peranan Sektor Informal Dalam Penyerapan Tenaga Kerja*, PP3ES, Jakarta